

## **Analisis Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal serta Hubungannya dengan Belanja Pegawai di Kabupaten Tebo**

**Sri Rosmawati; M.Rachmad R; Zamzami**

Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

### **Abstract.**

The ability of fiscal capacity that does not support the fiscal needs allows the fiscal gap . General Allocation Grand which comes from the central government aims to address the fiscal gap . Based on the explanation Regulation No. 55 of 2005 on the balance funds , General Allocation Grand (DAU) aimed at inter- regional equalization capabilities through the application of a formula that takes into account the needs of personnel expenditure , fiscal needs and potential of the region . This study was conducted to determine the effect of Construction Cost Index , Relative Poverty Index and Human Development Index for Fiscal Needs . This study uses multiple regression analysis 2001-2011 . And to determine the relationship of DBH and Local Revenue Fiscal Capacity in Tebo regency, as well as to determine the relationship between Fiscal Capacity, Fiscal Needs and personnel expenditures performed by Pearson correlation test . The survey results revealed that the Construction Cost Index and relative poverty index negatively affect on Fiscal Needs . Human Development Index positive effect on Fiscal Needs in Tebo. Pearson correlation of test results are known DBH positively and significantly associated with a P value or Sig 0,000 and Locally Generated Revenue positive and significant with a P value Fiscal Capacity sig 0.033 or less than 0.05 . Fiscal Needs and Fiscal Capacity positively associated with personnel expenditures and significant with a P value or Sig 0.000 or less than 0.05.

*Keywords: Fiscal capacity, General Allocation Grand, Fiscal Need*

---

### **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah di satu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain menimbulkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Pada hakekatnya, kemampuan setiap daerah dalam melaksanakan fungsi otonominya tidak sama satu daerah dengan daerah lainnya. Disatu pihak, beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang mempunyai sumber-sumber penerimaan yang bersifat potensial. Dilain pihak, banyak kabupaten/kota yang memiliki kemampuan yang sangat terbatas sehingga mengalami kesulitan dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerahnya.

Lebih lanjut, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik, dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Tujuan adanya dana perimbangan ini adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya serta mengurangi kesenjangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) juga mengurangi kesenjangan sumber pendanaan pemerintahan antar daerah (horizontal fiscal imbalance).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk horizontal equity dan sufficiency (Mardiasmo, 2004). Tujuan horizontal equity merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata, agar tidak terjadi kesenjangan yang tinggi antar daerah. Sementara tujuan sufficiency merupakan kepentingan daerah untuk menutupi kesenjangan fiskal. Kesenjangan fiskal ini merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah.

Kabupaten Tebo, yang merupakan kabupaten pemekaran, dalam pengelolaan keuangan daerahnya memperoleh sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana perimbangan berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan penerimaan lain-lain yang sah. Dari seluruh penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang besar adalah berasal dari transfer pemerintah pusat, terutama dana alokasi umum (DAU). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tebo selama ini masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam hal pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji pegawai. Berkaitan dengan hal itu, strategi alokasi belanja daerah memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 1 Perkembangan Total Pendapatan dan DAU Kabupaten Tebo 2009 - 2013**

Tahun	Total Pendapatan	DAU	Kontribusi DAU %
2009	467,033,090,000	281,381,120,000	60.25
2010	478,266,000,000	285,582,000,000	59.71
2011	582,953,000,000	339,731,000,000	58.28
2012	645,279,170,145	410,846,427,000	63.67
2013	726,060,026,750	461,006,766,000	63.49

Sumber: Depkeu RI

Berdasarkan dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa kontribusi DAU terhadap total pendapatan dari Kabupaten Tebo masih berada diatas 50 persen. DAU masih sangat diharapkan sesuai dengan perkembangan pembangunan di kabupaten Tebo.

Berdasarkan Penjelasan PP No 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, dana alokasi umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal dan potensi daerah. Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam.

Tim Departemen Keuangan RI (2001) membangun penghitungan alokasi DAU tahun anggaran 2002 dengan menggunakan Indeks Kemiskinan Relatif sebagai salah satu variabel dalam penghitungan Kebutuhan Fiskal. Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Kemiskinan Relatif dan Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan bagian dari komponen Kebutuhan Fiskal yang berkaitan dengan Kemampuan pengelolaan keuangan dan pengalokasian belanja daerah oleh pemerintah daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi bagian yang juga penting untuk mengukur kemajuan suatu daerah.

Menurut Ginting dkk (2008) yang menyatakan bahwa sudah saatnya pembangunan tidak lagi diletakkan pada kekuatan sumber daya alam, tetapi pada kekuatan sumber daya manusia. Caranya adalah dengan meletakkan prioritas pembangunan pada pembangunan manusia yang pada akhirnya pembangunan manusia yang berhasil akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan hal ini pun berpengaruh terhadap semakin bekurangnya angka kemiskinan.

Keberhasilan suatu daerah dalam membangun infrastruktur bagi kelancaraan mobilisasi kebutuhan masyarakat juga sangat diharapkan. Dengan infrastruktur yang memadai kesulitan dalam menjangkau suatu daerah menjadi berkurang . Tingkat Kemahalan Konstruksi ikut diperhitungkan pada Kebutuhan Fiskal karena mencerminkan tingkat harga konstruksi yang dibutuhkan dalam menyediakan infrastruktur dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini dipandang perlu karena keadaan dan tingkat kesulitan geografis disetiap daerah berbeda-beda.

Kabupaten Tebo masih terus melakukan pembenahan baik dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Berbagai kebijakan terus diupayakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal guna mengurangi celah fiskal yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Kemiskinan Relatif dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kebutuhan Fiskal di Kabupaten Tebo; hubungan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kapasitas Fiskal di Kabupaten Tebo; hubungan Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal dengan Belanja Pegawai di Kabupaten Tebo.

## METODE PENELITIAN

### Data yang Digunakan

Data yang digunakan berupa APBD, Tebo Dalam Angka dan Data Kepegawaian Daerah. Data bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tebo, Badan Pusat Statistik dan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

### Analisis Data

#### Tujuan 1

Untuk menganalisis pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Kemiskinan Relatif dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kebutuhan Fiskal di Kabupaten Tebo, digunakan model ekonometrika berikut:

$$\text{Ln FN} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{IKK} + \alpha_2 \text{IKR} + \alpha_3 \text{IPM} + e$$

Keterangan;

FN	= Kebutuhan Fiskal
IKK	= Indeks Kemahalan Konstruksi
IKR	= Indeks Kemiskinan Relatif
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
$\alpha$	= Parameter
$e$	= Error Term

#### Tujuan 2

Untuk menganalisis hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Kapasitas Fiskal serta hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Kapasitas Fiskal, digunakan alat uji Korelasi sederhana Pearson dengan formulasi berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{(n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2)} \sqrt{(n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2)}}$$

Dimana:

- $r_{xy}$  = nilai korelasi antara  $x_i$  dengan  $y_i$
- $n$  = jumlah periode
- $x_i$  = Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah
- $y$  = Kapasitas Fiskal

**Tujuan 3**

Untuk menganalisis hubungan antara Kebutuhan Fiskal dengan Belanja Pegawai serta hubungan Kapasitas Fiskal dengan Belanja Pegawai, digunakan alat uji Korelasi sederhana Pearson dengan formulasi berikut :

$$r_{xy} = \frac{n\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{(n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2)} \sqrt{(n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2)}}$$

Dimana:

- $r_{xy}$  = nilai korelasi antara  $x_i$  dengan  $y_i$
- $n$  = jumlah periode
- $x_i$  = Kebutuhan Fiskal atau Kapasitas Fiskal
- $y$  = Belanja Pegawai

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Kemiskinan Relatif dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kebutuhan Fiskal di Kabupaten Tebo.**

Hasil estimasi pengaruh indeks kemahalan konstruksi, indeks kemiskinan relatif dan indeks pembangunan manusia terhadap kebutuhan fiskal di Kabupaten Tebo diberikan pada tabel berikut:

**Tabel 1 Hasil Estimasi Model Regresi Kebutuhan Fiskal**

Variabel	koefisien	t-Statistik	Prob.
C	-1.198845	-1.031266	0.3367
IKK	-0.000106	-0.250940	0.8091
IKR	-0.329439	-5.435371	0.0010
IPM	0.389551	24.32556	0.0000
F- Hitung	625.0997	Prob F = 0.00000	
R <sup>2</sup>	0.996281		

Dari uji simultan (Uji F-statistik), dengan probabilitas F sebesar 0.0000 menunjukkan bahwa Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Kemiskinan Relatif, Indeks Pembangunan Manusia secara bersama-sama mempengaruhi Kebutuhan Fiskal. R Square (R<sup>2</sup>) sebesar 0.996281 menunjukkan bahwa variasi perubahan Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Kemiskinan Relatif, Indeks Pembangunan Manusia mampu menjelaskan perubahan Kebutuhan Fiskal sebesar 99,62 persen sedangkan sisanya sebesar 0,38 persen dipengaruhi oleh variasi perubahan lain di luar model penelitian ini.

Uji t-statistik digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial memperlihatkan bahwa terdapat dua variabel yang berpengaruh signifikan (probabilitas < 0,01) yaitu indeks kemiskinan

relatif (IKR) dan indeks pembangunan manusia (IPM). Sebaliknya, indeks kemahalan konstruksi (IKK) tidak berpengaruh signifikan terhadap kebutuhan fiskal.

Pada dasarnya tujuan dilakukannya penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi adalah untuk memperoleh gambaran tingkat kesulitan geografis. Letak suatu wilayah yang strategis akan memberikan kontribusi pengaruh terhadap perkembangan wilayah tersebut. Kabupaten Tebo, dengan luas 646.100 Ha atau 11,86 % dari luas wilayah Provinsi Jambi. Topografi Kabupaten Tebo umumnya merupakan dataran rendah dan sedikit berbukit dan rawa-rawa dengan kemiringan bervariasi. Dengan kondisi wilayah seperti ini daerah Kabupaten Tebo relatif mudah untuk di jangkau. Hal ini menyebabkan indeks kemahalan konstruksi tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kebutuhan fiskal.

Acuan penghitungan Kebutuhan Fiskal yang didasarkan pada agregat pengeluaran mencakup jumlah dana yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan publik. Indeks Kemiskinan Relatif mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kebutuhan Fiskal Kabupaten Tebo. Hal ini menunjukkan semakin tinggi angka indeks kemiskinan relatif maka akan menurunkan Kebutuhan Fiskal. Pada kenyataannya adalah semakin tinggi Indeks Kemiskinan Relatif maka akan meningkatkan Kebutuhan Fiskal. Karena dengan semakin tingginya angka kemiskinan berarti dana yang dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan juga semakin meningkat. Hasil penghitungan ternyata bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya. Dugaan yang dapat dikemukakan adalah Kebutuhan Fiskal tidak dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin yang harus dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Tebo. Tetapi lebih kepada peningkatan pelayanan kepada seluruh masyarakat, baik sarana, prasarana dan pelayanan sosial lainnya.

**Hubungan Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah dengan Kapasitas Fiskal di Kabupaten Tebo.**

Kapasitas fiskal daerah merupakan cerminan kemampuan keuangan suatu daerah yang dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam perolehan Dana Alokasi Umum. Dalam penelitian ini data kapasitas fiskal yang digunakan adalah Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menghitung besaran nilai hubungan antara Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah dengan Kapasitas Fiskal digunakan alat uji Korelasi Pearson. Hasil uji korelasi Pearson diperoleh :

**Tabel 2. Korelasi Antara Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah dengan Kapasitas Fiskal**

		KF	DBH	PAD
KF	Pearson Correlation	1	.893**	.642*
	Sig. (2-tailed)		0	0.033
DBH	Pearson Correlation	.893**	1	.626*
	Sig. (2-tailed)	0		0.039
PAD	Pearson Correlation	.642*	.626*	1
	Sig. (2-tailed)	0.033	0.039	

\* signifikan pada  $\alpha = 5\%$ ; \*\* signifikan pada  $\alpha = 1\%$

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa korelasi antara variabel Dana Bagi Hasil (X1) dengan Kapasitas Fiskal (Y) adalah sebesar 0.893. Hal ini berarti perubahan yang terjadi pada Dana Bagi Hasil akan diikuti secara positif oleh Kapasitas Fiskal.

Hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan karena nilai P atau sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%).

Korelasi antara variabel Pendapatan Asli Daerah (X2) dengan Kapasitas Fiskal (Y) adalah sebesar 0,642 dengan arah positif. Hal ini berarti setiap perubahan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah akan diikuti secara positif oleh Kapasitas Fiskal. Hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan karena nilai P atau Sig. sebesar 0,033 (3,3%) lebih kecil dari tingkat kesalahan sebesar 0,05 (5%).

**Hubungan kebutuhan dan kapasitas fiskal dengan belanja pegawai di Kabupaten Tebo.**

Untuk menghitung besaran nilai hubungan antara Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal dengan Belanja Pegawai, digunakan alat uji Korelasi Pearson. Hasil uji korelasi Pearson sebagai berikut :

**Tabel 3. Korelasi Antara Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal dengan Belanja Pegawai**

		BP	FN	KF
BP	Pearson Correlation	1	.992**	.960**
	Sig. (2-tailed)		0	0
FN	Pearson Correlation	.992**	1	.987**
	Sig. (2-tailed)	0		0
KF	Pearson Correlation	.960**	.987**	1
	Sig. (2-tailed)	0	0	

\* signifikan pada  $\alpha = 5\%$ ; \*\* signifikan pada  $\alpha = 1\%$

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa korelasi antara variabel Kebutuhan Fiskal (X1) dengan Belanja Pegawai (Y) adalah sebesar 0.992 Hal ini berarti perubahan yang terjadi pada Kebutuhan Fiskal akan diikuti secara positif oleh Belanja Pegawai sebesar 99,2 persen . Hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan karena nilai P atau sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%).

Korelasi antara variabel Kapasitas Fiskal (X2) dengan Belanja Pegawai (Y) adalah sebesar 0,960 dengan arah positif. Hal ini berarti setiap perubahan yang terjadi pada Kapasitas Fiskal akan diikuti secara positif oleh Belanja Pegawai 96 persen. Hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan karena nilai P atau Sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan sebesar 0,05 (5%).

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

1. Hasil analisis pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Kemiskinan Relatif dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tebo menunjukkan bahwa Indeks Kemahalan Konstruksi tidak berpengaruh signifikan, Indeks Kemiskinan Relatif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kebutuhan Fiskal. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kebutuhan Fiskal.
2. Hubungan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kapasitas Fiskal adalah positif dan signifikan yang berarti bahwa setiap perubahan yang terjadi pada Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah akan diikuti secara

positif oleh Kapasitas Fiskal.

3. Hubungan kebutuhan dan kapasitas fiskal dengan belanja pegawai di Kabupaten Tebo adalah positif dan signifikan yang berarti bahwa setiap perubahan yang terjadi pada Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal akan diikuti secara positif oleh Belanja Pegawai.

#### **Saran**

1. Pembangunan yang dilakukan bukan hanya fisik saja tetapi juga pembangunan non fisik. Pengalokasian dana kepada peningkatan kualitas masyarakat akan membawa banyak pengaruh bagi pertumbuhan di Kabupaten Tebo. Dengan kualitas manusia yang baik, maka akan bermuara pada peningkatan kehidupan yang layak dan kesejahteraan serta mengurangi angka kemiskinan
2. Pemerintah Kabupaten Tebo, harus terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil agar kemandirian daerah dapat tercapai. Hal ini dapat dilakukan dengan Peningkatan PAD terkait dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak. Dengan cara meningkatkan efisiensi pemungutan dan efisiensi administrasi pajak, serta perbaikan kontrol terhadap petugas untuk meminimalkan kebocoran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan lebih baik dititik beratkan pada intensifikasi sumber-sumber Pos Retribusi Daerah, mengingat retribusi sangat berkaitan dengan pelayanan langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Sedangkan pajak-pajak daerah dapat ditetapkan secara limitasi pada obyek pajak yang potensial, sehingga akan tercapai target yang telah ditetapkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2006), Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta
- Basri, M dan Subri, (2003), Keuangan Negara dan Desentralisasi Fiskal , LPEM, FE-UI, Jakarta
- Depdagri, (2004), Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah
- Depdagri, (2004), Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Depdagri, (2005), Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
- Departemen Keuangan RI, (2006), Tinjauan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2004-2005
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi, J. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63-70.
- Gujarati, D. (1995), Ekonometrika Dasar, Terjemahan Rajawali Press, Jakarta
- Halim, A dan Iqbal, (2012), Bunga Rampai Pengelolaan Keuangan Daerah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Junaidi, J. (2014). Regresi dengan Microsoft Office Excel. Jambi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
- Kuncoro, M. (2004), Otonomi dan Pembangunan Daerah, Erlangga, Jakarta
- Musgrave, RA dan Musgrave, PB, (1991), Public Finance In Theory and Practice, Terjemahan Erlangga, Jakarta
- Mangkusobroto, G. (1991), Ekonomi Publik, Badan Penerbit FE- UGM, Yogyakarta
- Mardiasmo, (2000), Otonomi dan Keuangan Daerah, BP FE-UGM, Yogyakarta
- Mahmudi, (2010), Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga, Jakarta
- Novitri, Q., Junaidi, J., & Safri, M. S. M. (2014). Determinan Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(3), 149.
- Rodianto, B. (2012), Analisis Determinasi Alokasi Anggaran dan Struktur Belanja Pegawai Pada Kabupaten Bungo, Tesis
- Roflin, E (2007), Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum di Propinsi Sumatera Selatan, Kajian Ekonomi vol.6 No.2
- Sidik, M. (1999), Otonomi dan Desentralisasi Fiskal , FE-UGM, Yogyakarta
- Syaukani, H., Gaffar, A., & Rasyid, M. R. (2002). Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- TADF, 2012, Reformulasi DAU Untuk Memperkuat Peran Sebagai Equalization Grant. Tim Asistensi Desentralisasi Fiskal Kementerian Keuangan
- Widodo, A. dkk, (2011), Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Tengah, UnDip, Semarang